
**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019****Oleh****Annisa Nuraeni¹⁾, Dian Purwanti²⁾, M.Rijal Amirulloh³⁾****^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi****E-mail: ¹annisanuareni199@gmail.com, ²dianpurwanti042@ummi.ac.id,
³mrijal.amirulloh@yahoo.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas tunanetra dan mengkaji faktor-faktor yang mendorong tingkat partisipasi pemilih disabilitas tunanetra di Kabupaten Sukabumi pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Sukabumi pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk meningkat. Meningkatnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Adanya perangsang politik, Karakteristik Pribadi Seseorang, Karakteristik social, situasi atau lingkungan politik.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilih, Disabilitas, Pemilu**PENDAHULUAN**

Partisipasi Politik masyarakat dalam konteks demokrasi dapat ditunjukkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Pada hakikatnya pemilihan umum merupakan sebuah ajang pesta demokrasi untuk masyarakat di negara yang menganut sistem demokrasi.

Partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah Budiardjo (2008:367).

Pada tanggal 17 April tahun 2019 telah di selenggarakan pemilihan umum secara serentak. Pemilihan umum secara serentak dapat diartikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu yang dilakukan secara bersamaan. Pemilu umum secara serentak tersebut menjadi sejarah demokrasi Indonesia, karena pemilu tahun tersebut menjadi pemilu yang pertama kali

dilaksanakan di Indonesia secara serentak pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan.

Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yaitu pada partisipasi dan peran aktif dari masyarakat. Semua masyarakat sebagai warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam memenuhi hak, kedudukan, dan peran yang sama. Demikian pula dengan pemilih disabilitas untuk memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Namun pada kenyataannya masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas khususnya pemilih tuna netra dalam pemilihan umum, antara lain (Muladi, 2009:261) hak untuk didaftar guna memberikan suara, hak atas akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu, hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Hak politik disabilitas telah diatur dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13, dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan

kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya yakni : memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik;

membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berikut merupakan data jumlah pemilih tetap dan jumlah pengguna hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 yang ditampilkan di bawah ini :

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pengguna Hak Pilih Penyandang Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap	Daftar Pengguna Hak Pilih
1	Tuna Daksa	762	257
2	Tuna Netra	568	192
3	Tuna Rungu	563	190
4	Tuna Grahita	243	82
5	Disabilitas Lainnya	618	270

6	Total	2.754	991
---	-------	-------	-----

Sumber : KPU Kabupaten Sukabumi

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas tergolong rendah di karenakan seluruh pemilih penyandang disabilitas angka partisipasinya tidak mencapai 50% , dan tentunya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun penelitian yang akan peneliti fokuskan yaitu pada pemilih disabilitas tunanetra.

Penelitian memfokuskan pada pemilih disabilitas tunanetra karena pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 pemilih disabilitas tunanetra akan berhadapan dengan beberapa kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif.

Kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas tuna netra saat dilaksanakannya pemilu yaitu berdasarkan berita mengenai kesetaraan hak penyandang disabilitas (kompas.com, 2019) kendala yang dialami oleh penyandang tuna netra pada pemilihan umum tahun 2019 adalah kesulitan untuk memilih karena tidak adanya template braille pada calon anggota legislatif sehingga penyandang disabilitas tunanetra kesulitan untuk mengenali sosok pemimpin yang akan dipilih, meskipun ada petugas yang membantu tetapi para pemilih tuna netra mengalami kebingungan saat memilih.

Pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU hanya cara mencoblos saja, tetapi tidak ada sosialisasi yang di khususkan mengenai calon anggota legislatif dan apa saja program yang akan dijalankannya, sehingga tidak ada keraguan untuk memilih. . Masalah tersebut perlu diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pemilu untuk penyandang disabilitas tuna netra.

Pada permasalahan tersebut namun angka partisipasi pemilih disabilitas tunanetra mengalami peningkatan sebesar 13,9% sejak tahun 2018 pada pemilihan kepala daerah sampai taun 2019 pada pemilihan umum. Namun mengalami penurunan sebesar 1,8% dari tahun 2019 sampai tahun 2020 pada

Pemilihan Kepala daerah, berikut merupakan data pengguna hak pilih disabilitas tunanetra tahun 2018-2020 :

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pengguna Hak Pilih Tunanetra

No	Tahun	Daftar Pemilih Tetap Tunanetra	Daftar Pengguna Hak Pilih Tunanetra	Persentase
1	2018	611	122	19,9%
2	2019	568	192	33,8%
3	2020	349	115	32,9%

Sumber : KPU Kabupaten Sukabumi

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa di pemilihan kepala daerah tahun 2018 jumlah daftar pemilih tetap tunanetra berjumlah 611 orang, pada pemilihan umum tahun 2019 berjumlah 568, dan pemilihan kepala daerah tahun 2020 berjumlah 349 orang . Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya yaitu pada tahun 2018 berjumlah 122 orang atau 19,9%, tahun 2019 berjumlah 192 orang atau 33,8%, dan pada tahun 2020 berjumlah 115 orang atau 32,9%. Daftar pemilih tetap tunanetra pada tabel tersebut menurun di setiap tahunnya, dan pada daftar pengguna hak pilih tunanetra terdapat kenaikan pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 kembali menurun.

Dilihat dari perbandingan angka partisipasi politik tunanetra pada pilkada tahun 2018, pemilu tahun 2019, serta pilkada tahun 2020 jumlah partisipasi terbanyak yaitu pada pemilu tahun 2019, padahal pada pemilu tahun 2019 tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemilih tunanetra, namun angka partisipasi politik pemilih tunanetra meningkat pada pemilu tahun 2019.

Adanya peningkatan partisipasi politik tersebut diteliti dengan menganalisis faktor-faktor yang mendorongnya berdasarkan teori pendukung partisipasi politik dari Milbrath. Dari kelima faktor pendukung partisipasi politik menurut Milbrath, satu demi satu faktor dibedah kontribusinya dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada

pemilu tahun 2019. Dari pembahasan kelima faktor pendukung partisipasi politik akan diketahui faktor mana yang paling mendukung peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas tunanetra dan faktor mana yang tidak memberi dukungan dalam peningkatan politik pemilih penyandang disabilitas tunanetra. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini mampu memberi kontribusi positif yang bermanfaat bagi dunia akademis sebagai salah satu bahan kajian kepeiluan. Selain itu, tulisan ini juga memberi kontribusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Satori dan Komariah (2017:25) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena dianggap tepat dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dikarenakan metode penelitian kualitatif akan mampu diguna Selain itu alasan yang mendasar digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah: (1) masalah penelitian sudah tergambar; (2) untuk memahami makna dibalik data yang tampak; (3) untuk memahami persepsi masyarakat; (4) untuk memahami dan mengkaji aktivitas Individu dalam partisipasi politik; (5) untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tahun 2019. (6) untuk memastikan kebenaran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator dalam penelitian partisipasi politik pemilih tunanetra pada pemilihan umum tahun 2019 dilihat dari faktor pendorong partisipasi politik memakai teori Milbrath, yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik. Faktor perangsang politik adalah faktor dimana suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang antara lain adalah keterlibatan penyandang disabilitas dalam diskusi politik dan keaktifan penyandang disabilitas dalam mengakses media massa. Kemudian, faktor karakteristik pribadi seseorang merupakan faktor dari watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Karakteristik pribadi penyandang disabilitas tersebut di antaranya rasa kepedulian yang dimiliki serta adanya kemauan untuk terlibat dalam politik.

Selanjutnya, faktor karakteristik sosial yang menggambarkan status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan memengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam aktivitas. Dengan kata lain, sikap penyandang disabilitas juga tergantung dari karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, ras dan etnis, dan agama. Kemudian, faktor situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Maka, situasi atau lingkungan politik yang mendukung penyandang disabilitas dalam berpartisipasi adalah situasi lingkungan sekitar yang demokratis dan pengaruh tokoh sekitar.

Dari keempat faktor teori Milbrath tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor memiliki kontribusi dalam peningkatan partisipasi politik pemilih tunanetra pada pemilihan umum tahun 2019.

Faktor pendorong yang pertama yaitu : 1). faktor perangsang politik yang lebih banyak dikarenakan terselenggaranya diskusi-diskusi informal yang dilaksanakan oleh komunitas

ITMI. Diskusi-diskusi politik terselenggara pada masa tahapan sebelum tahapan pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2019.

Diskusi politik yang dilakukan oleh pemilih tunanetra komunitas ITMI Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan cukup antusias atau cukup sering melakukan diskusi politik ketika menjelang diadakannya Pemilihan Umum, dalam diskusi politik ini juga mereka cenderung lebih membahas mengenai perkembangan dan hak-hak disabilitas. Mereka melakukan diskusi politik dengan teman normal juga dilakukan secara non-formal dan tidak ada mengikuti suatu forum khusus yang membahas secara rinci mengenai program kerja dari pasangan calon .

Komunitas ITMI Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wadah bagi pemilih tunanetra untuk melakukan diskusi bersama anggotanya. Dari segala umur anggota didalamnya, ketika proses berlangsungnya diskusi, peran dari komunitas ITMI Kabupaten Sukabumi dalam diskusi politik dapat dikatakan menjadi salah satu pengaruh yang cukup besar bagi anggotanya. Dengan dilakukannya diskusi politik, mereka lebih bisa bertukar pikiran dengan sesama penyandang disabilitas tunanetra yang telah memiliki pengalaman dalam menghadapi pemilihan umum sebelumnya. Maka, dalam berdiskusi politik yang dilakukan menjadi salah satu kesempatan bagi mereka untuk menanyakan mengenai pemahaman tentang calon-calon dalam pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan dapat dinyatakan bahwa faktor yang mendorong partisipasi politik pemilih tunanetra ini karena sering mendengarkan berita-berita melalui televisi maupun radio . Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tunanetra mempunyai dorongan untuk berpartisipasi karena media massa. Mengenai keaktifan mengakses media massa, banyak penyandang disabilitas tunanetra yang melek informasi, yaitu aktivis-aktivis penyandang disabilitas tunanetra yang dapat mengakses media massa dan media sosial. Tidak hanya aktivis yang

dapat mengakses media massa tetapi juga para penyandang disabilitas yang tidak aktif di lembaga advokasi penyandang disabilitas tunanetra karena pengaruh kemajuan teknologi seperti penggunaan smartphone yang mempermudah para penyandang disabilitas untuk mengakses media.

2) Faktor karakteristik pribadi yang menurut Milbrath merupakan salah satu faktor pendukung dalam partisipasi politik memang terbukti, Karakteristik pribadi penyandang disabilitas yang memiliki rasa kepedulian terhadap isu-isu difabel tunanetra serta kemauan terlibat dalam kegiatan politik juga memengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak tahun 2019. Hal itu dikarenakan sesama penyandang disabilitas tunanetra memiliki rasa kebersamaan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak dalam politik seperti pemilu. Selain itu, karakteristik penyandang disabilitas tunanetra yang aktif juga terdorong selain dari pengaruh aktivis penyandang disabilitas tunanetra.

Kesadaran akan pentingnya pemilihan umum bagi penyandang disabilitas tunanetra tersebut juga didukung oleh motivasi penyandang disabilitas tunanetra untuk tahu mengenai hak difabel dalam pilkada, termasuk pelayanan khusus yang didapat oleh pemilih penyandang disabilitas seperti TPS yang dapat diakses dan ramah difabel serta pelayanan petugas KPPS yang benar dalam melayani pemilih penyandang disabilitas tunanetra sesuai jenis kedifabelannya.

Karakteristik yang peduli juga tercermin dari kemauan serta kerelaan banyak penyandang disabilitas tunanetra untuk terlibat dalam pemantauan di setiap tahapan pemilu, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran termasuk salah satunya tahapan pemutakhiran data pemilih tentang valid tidaknya data pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih. Kemauan penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh adanya rasa panggilan jiwa tanpa diberi honor sama sekali untuk turut terlibat dalam suatu ajang perhelatan demokrasi yang membuktikan

bahwa keterbatasan bukan halangan untuk turut menyaksikan perhelatan pesta demokrasi.

3) Faktor Sosial

Faktor karakteristik sosial yang menggambarkan status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam aktivitas. Dengan kata lain, sikap penyandang disabilitas tunanetra juga tergantung dari karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, ras dan etnis, dan agama.

Selanjutnya dari faktor ekonomi, biasanya orang yang mempunyai faktor ekonomi yang lemah contohnya bila diberi kebutuhan pokok atau sejumlah uang orang mau memilih (orang yang sering becanda, intinya dia mau memilih karena diberi imbalan). Dalam menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019, beberapa dari Informan mengaku telah mendapat imbalan seperti sembako agar memberikan hak suaranya untuk salah satu calon tertentu .

4) faktor situasi atau lingkungan politik juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam partisipasi politik. Faktor situasi atau lingkungan politik yang berperan dalam partisipasi politik penyandang disabilitas tunanetra dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di antaranya karena dukungan lingkungan yang demokratis dalam kehidupan penyandang disabilitas tunanetra serta adanya tokoh-tokoh penyandang disabilitas tunanetra yang akhirnya menjadi panutan di lingkungan penyandang disabilitas.

Kabupaten sukabumi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya merupakan lingkungan yang demokratis, setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas tunanetra diberi kebebasan untuk menentukan suaranya. Hal itu juga terlihat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang memberi ruang berekspresi dan ruang berpendapat kepada penyandang disabilitas tunanetra tentang salah satu hal yang krusial dalam pemilihan umum serentak, yaitu daftar pemilih. Dengan demikian, penyandang

disabilitas tunanetra dapat nyaman dan merasa diberi tempat untuk menentukan hak politiknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya mengenai partisipasi politik pemilih tunanetra pada pemilihan umum tahun 2019, dilihat dari factor pendorong partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbath dalam Maran, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Perangsang Politik

Dalam penelitian ini faktor-faktor perangsang politik yang ada pada pemilih tunanetra yaitu salah satunya adalah media elektronik dan juga media sosial serta mengikuti diskusi-diskusi informal bersama pemilih tunanetra lainnya khususnya komunitas Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Sukabumi .dimana media tersebut mempengaruhi dorongan kepada pemilih tunanetra .

2. Karakteristik Pribadi Seseorang

Pemilih tunanetra anggota ITMI Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 mengaku bahwa mereka telah menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin menjadi bagian dari pemilih yang golput dan telah sadar bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan serta menggunakan hak pilihnya karena hal tersebut adalah penting dan wajib bagi Warga Negara Indonesia . mereka melakukan pemberian suara tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan memilih sesuai dengan pasangan maana yang mereka yakini dapat membawa perubahan kedepannya.

3. Karakteristik Sosial

Dalam menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019, beberapa dari Informan mempunyai sikap bahwa mereka yakin sebagai seorang muslim harus memilih calon pemimpin yang mempunyai latar belakang agama yang baik agar bisa menjadi teladan bagi pengikutnya, maksudnya adalah para pemimpin harus mengerti dan taat agama, Amanah,

tanggung jawab, dan sikap lain yang mencerminkan pemimpin yang baik menurut agama islam.

Namun sayangnya, ada beberapa oknum dari pemilih penyandang tunanetra yang mengaku telah mendapat imbalan seperti sembako agar memberikan hak suaranya untuk salah satu calon tertentu. Karakteristik social, ekonomi, dan agama dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih tunanetra pada pemilihan umum tahun 2019

4. Situasi atau lingkungan politik

Situasi lingkungan politik di Yayasan Ikatan Tunanetra ini sudah kondusif dan membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis mereka merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter.

Saran

1. Panwaslu atau banwaslu agar menindak tegas para calon pemimpin pada pemilihan umum yang melakukan money politic
2. KPU atau panitia pemilihan umum agar menyediakan alat bantu coblos atau template barille untuk penyandang tunanetra agar bisa menunjang dan meningkatkan pemilu di tahun-tahun berikutnya.
3. KPU atau panitia pemilu agar lebih memperhatikan terkait sosialisasi para calon anggota legislatif agar lebih aktif lagi bersosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas tunanetra atau penyandang disabilitas lainnya.
4. Untuk pemilih tunanetra kabupaten sukabumi harus lebih aktif berpartisipasi pada setiap Pemilu yang diselenggarakan tidak hanya aktif berpartisipasi pada satu Pemilu saja, contohnya pada Pemilu serentak 2019, pemilih tunanetra hanya terlalu fokus berpartisipasi pada Pilpres saja sampai kurang tertarik memberikan hak suaranya pada Pemilihan umum

Legislatif. Harus tetap rasional terhadap setiap Pemilu yang di selenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- [3] Huntington, Samuel P, Joan N. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta.
- [4] Maran, Rafael R. 2014. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rineka Cipta
- [5] Milbarth, Lester. 1965. Political Partisipation, How and Way, Do get Involved in Politics. Chicago : Rand McNally.
- [6] Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rajawali Press
- [7] Satori D dan Komariah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- [8] Setiadi, Elly M dan Usman K. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- [9] Soleh, A. 2016. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi. Yogyakarta : PT LKIS Printing Cemerlang.
- [10] Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- [11] Surbakti, R. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- [12] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN